

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik oleh karena itu pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas, dan mampu memberikan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku (Harmoni, 2016). Laporan keuangan harus menyajikan informasi keuangan yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku, didalam menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah daerah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih terdapat penyimpangan. Hal ini mendorong meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk menerapkan akuntabilitas publik yaitu melalui suatu media pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dilaksanakan secara periodik seperti yang dilansir oleh <http://ppid.semarangkota.go.id>, berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2016 masih perlu mendapat

perhatian diantaranya, BPK masih menemukan adanya 3 kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai contoh pengendalian pengelolaan pendapatan dan piutang lainnya pada dinas pertanian belum memisahkan pengembalian pokok dan bunganya, dan saldo piutang tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adanya bukti-bukti empiris yang menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan peran audit internal.

Penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah (PP Nomor 71 Tahun 2010) yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD di Indonesia (Susilawati dan Riana, 2013). SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Penerapan SAP oleh pemerintah daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi yang berguna (Zeyn, 2011).

Kompetensi SDM adalah kemampuan seseorang atau individu, dalam suatu organisasi atau lembaga untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kompetensi SDM merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SPIP dan SAP adalah manusia (Indriasih, 2014).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang, “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan” (Harnoni, 2016)

Pemanfaatan teknologi informasi, semakin berkembangnya teknologi informasi akan semakin memudahkan seseorang untuk melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Menurut Komarasari (2016), kapasitas yang belum memadai belum tentu menghasilkan laporan keuangan yang andal jika masih belum didukung dengan teknologi informasi. Dengan tersedianya teknologi informasi yang terus berkembang diharapkan akan membantu dalam proses pembuatan dan penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

Peran auditor internal pemerintah/Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi

serta program-program pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuannya. Sehingga dengan adanya pengawasan intern tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Inapty dan Martiningsih, 2016).

Hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan terdapat ketidakkonsistenan diantaranya sebagai berikut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktarina, Raharjo, dan Andini (2016); Triwardana (2017); Wati, Herawati, dan Sinarwati (2014); Triwahyuni (2016), menunjukkan bahwa faktor Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Inapty dan Martiningsih (2016) menunjukkan bahwa faktor Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hakim (2017) dan Harnoni (2016), menunjukkan bahwa faktor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian tersebut disangkal dengan penelitian lain yang dilakukan oleh yang dilakukan Yensi, Hasan dan Anisma (2014), yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Oktarina, Raharjo, dan Andini (2016); Triwardana (2017); Wati, Herawati, dan Sinarwati (2014); Yensi, Hasan dan Anisma (2014); Hakim (2017); Hanifa, Wawo, dan Husin (2016); Harnoni (2016) menunjukkan bahwa faktor kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun dalam penelitian yang dilakukan Sholeh (2017) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan, Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Triwahyuni (2016) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Sholeh (2017) menyatakan bahwa dalam penelitiannya tentang penerapan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah namun berbebanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Harnoni (2016) tentang pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil-hasil penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat konsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini memotivasi peneliti untuk diuji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian Triwardana (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Triwardana (2017) adalah sebagai berikut : 1) Penelitian ini menambah variabel pemanfaatan teknologi informasi dan peran audit internal. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu

pegawai-pegawai pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah serta memudahkan dalam mengolah data keuangan secara sistematis sehingga diharapkan dapat membantu proses pembuatan dan penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu. Sedangkan peran audit internal bermanfaat dalam mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu instansi, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semakin baiknya proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh peran auditor internal ke instansi-instansi pemerintah tentunya akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan Pemda. (2) Objek penelitian Triwardana (2017) adalah pegawai yang bekerja pada SKPD Kabupaten Kampar sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD Kota Semarang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Bagaimana pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Bagaimana pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Serta melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan jumlah faktor-faktor dalam variabel yang lebih banyak jumlahnya dan

beragam macamnya. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan baik Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sehingga dapat terciptanya kinerja pemerintah yang baik.